



# 2022

**RENCANA KERJA**

**PERANGKAT DAERAH  
(RENJA PD)  
TAHUN 2022**



**DINAS PERHUBUNGA  
KABUPATEN PEMALANG**

Jl. HOS Cokroaminoto No. 3 Pemalang

Kode Pos :523

Telp : (0284)3215



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PERHUBUNGAN**

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 050/ 166 /2021

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 maka perlu disusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan tahunan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan

4. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 90 tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;
21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.
22. Peraturan Bupati Pemalang No 29 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022;

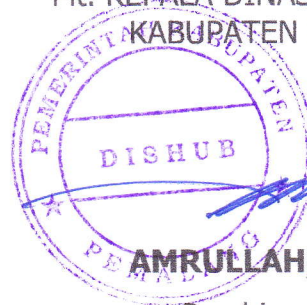
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 18 Oktober 2021

Pt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PEMALANG



**AMRULLAH, S.IP,M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19650215 198603 1 013

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2022 akhirnya dapat kami susun dengan segala keterbatasan yang ada.

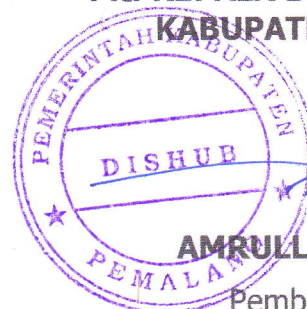
Renja merupakan suatu proses yang berorientasi pada pada hasil yang dicapai pada kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan berbagai potensi dan hambatan yang ada agar dapat mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah 2021-2026. Renja ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan serta program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan, dengan memperhitungkan capaian yang telah dicapai sampai dengan tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan Perubahan Renja ini masih perlu dimatangkan lagi melalui berbagai kegiatan antar seluruh komponen organisasi agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah 2021-2026 ini.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2022 untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan seluruh komponen organisasi dalam waktu satu tahun ke depan. Semoga Allah SWT meridhoi segala usaha dan upaya kita.

Pemalang, 18 Oktober 2021

**Pt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PEMALANG**



**AMRULLAH, S.IP, M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19650215 198603 1 013

## DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG NOMOR 050/ /2021	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
<b>BAB I</b> <b>Pendahuluan</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II</b> <b>Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	34
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah.....	39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	49
<b>BAB III</b> <b>Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan</b>	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.....	50
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	60
3.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah .....	65
<b>BAB IV</b> <b>Penutup .....</b>	<b>108</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2020 Dinas Perhubungan.....	8
Tabel 2.2	Rekapitulasi, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun 2020 Kabupaten Pemalang .....	10
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang .....	30
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020. Kabupaten Pemalang .....	40
Tabel 3.1	Strategi dan Kebijakan.....	65
Tabel 3.2	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Kabupaten Pemalang.....	69



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam perkembangannya diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membawa konsekuensi perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan system penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektif.

Perencanaan Pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah – dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Siantar – bertujuan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan ber sasaran sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agar perencanaan pembangunan tersebut dapat tersusun dengan baik dan tepat sasaran, maka perlu adanya pedoman Perencanaan Pembangunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dengan memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja-OPD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat,

yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang merupakan dokumen yang harus disusun oleh Dinas Perhubungan karena Dinas Perhubungan adalah lembaga yang sebagian besar kegiatannya secara langsung berhubungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dari dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan inilah akan dapat dilihat seberapa besar perhatian Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 memuat kebijakan pembangunan transportasi, yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Pemalang dimana secara substansi diawali dengan kondisi umum yang menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2022 secara singkat, serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2023 termasuk isu-isu strategis sektor transportasi. Berdasarkan cakupan tersebut, Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 diharapkan:

1. Menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dan Lembaga lembaga baik pemerintah maupun swasta yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang sebagai bagian dalam penyusunan APBD Kabupaten Pemalang.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ;
  22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 67);
  23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;
  24. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;
  25. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Proses perencanaan membutuhkan kontinuitas untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu dokumen rencana kerja, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Adapun maksud penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2023 antara lain adalah:

- a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategi jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Menyediakan acuan resmi bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran dan Kegiatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah adalah :

- a. Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ;
- b. Untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
- c. Untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja Organisasi Perangkat Daerah ;
- d. Sebagai acuan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pematang Jaya kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD;
- e. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2022 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : Pendahuluan**, memuat perihal latarbelakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

**BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**, memuat perihal Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

memuat perihal telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, tujuan dan sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah , serta program dan kegiatan.

**BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan**

Memuat tentang uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

**BAB V : Penutup**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah**

Tahun 2021 adalah merupakan tahap pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021, dan realisasi Renstra Dinas Perhubungan, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perhubungan.

Pada Tahun 2021, Dinas Perhubungan melaksanakan 11 program dengan 58 kegiatan. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021, Anggaran Belanja Dinas Perhubungan adalah sebesar Rp 10.121.771.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.947.808.804,00 sehingga capaian realisasi adalah sebesar 98.28%. Sedangkan untuk Pendapatan, dari 6 rekening pendapatan dengan total target anggaran pendapatan sebesar Rp 1.600.000.000,00 realisasi pendapatan adalah sebesar Rp 1.473.552.000,00 sehingga capaian realisasi pendapatan adalah 92.10%.

Berdasarkan sasaran strategis yang hendak dicapai, capaian realisasi anggaran dan kegiatan Tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.1. Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Jumlah Kegiatan	Prosentase Pelaksanaan	
			Target	Realisasi
1	Terwujudnya manajemen transportasi darat yang memadai guna mendukung keselamatan lalu lintas jalan	19	100,00%	100,00%
2	Meningkatnya pelayanan teknis pemeriksaan berkala kendaraan bermotor	2	100,00%	100,00%
3	Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan fasilitas perhubungan	7	100,00%	100,00%
4	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat melalui terwujudnya tertib administrasi, sarana perkantoran dan prasarana yang mendukung, peningkatan kualitas SDM, dan sistem pelaporan yang memadai	26	100,00%	100,00%
Jumlah		54	100,00%	100,00%

Dengan demikian, maka rata-rata capaian kinerja Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya adalah sebesar 100,00%. Pencapaian kinerja tersebut dilaksanakan melalui 11 program dengan 58 kegiatan yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

- *Sasaran pertama*, yaitu terwujudnya manajemen transportasi darat yang memadai guna mendukung keselamatan lalu lintas jalan. Rata-rata tingkat capaian kinerja mencapai 100,00%.
- *Sasaran kedua*, yaitu meningkatnya pelayanan teknis pemeriksaan berkala kendaraan bermotor.



Tingkat capaian sasaran kinerja mencapai 100,00%. Kondisi ini menunjukkan tercapainya sasaran dari kegiatan yang telah ditetapkan dengan terwujudnya kondisi kerja sebagaimana yang diharapkan dalam pemeliharaan alat uji, kalibrasi dan perbaikan balai uji.

- *Sasaran ketiga*, yaitu terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan fasilitas perhubungan.

Tingkat pencapaian kinerja yang telah dicapai adalah 100,00%. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana perhubungan (pemeliharaan terminal) telah dilaksanakan seluruhnya.

- *Sasaran keempat*, yaitu meningkatnya pelayanan kepada masyarakat melalui terwujudnya tertib administrasi, sarana perkantoran dan prasarana yang mendukung, peningkatan kualitas SDM, dan sistem pelaporan yang memadai.

Rata-rata tingkat pencapaian kinerja mencapai 100,00%. Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini menunjukkan bahwa kegiatan sudah terlaksana secara optimal.

Lebih lanjut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan tahun 2020 dan perkiraan realisasi pencapaian renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah  
Kabupaten Pemalang sampai dengan Tahun 2021**

Nama PD : **Dinas Perhubungan**

Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rancangan Renstra-PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2018 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020 (n-1)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
<b>1</b>				<b>Usuran Wajib</b>										
<b>1</b>	<b>07</b>			<b>Bidang Usuran Perhubungan</b>										
1	07	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<i>Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan</i>									
1	07	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat yang terkirim	17.500 surat	10.377 Surat	3.500 surat	3.500 surat	100,00	3.500 surat	1.148 surat	15.148 surat	86,56
1	07	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jenis sumber daya yang tercukupi	15 jenis	9 jenis	3 jenis, 12 bulan	3 jenis, 12 bulan	100,00	3 jenis	3 jenis	15 jenis	100,00
1	07	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan	Jasa peralatan dan	5 unit	3 unit	1 unit,	1 unit, 12	100,00	1 unit	1 unit	5 unit	

				dan Perlengkapan Kantor	perlengkapan yang tersedia			12 bulan	bulan					100,00
--	--	--	--	-------------------------	----------------------------	--	--	----------	-------	--	--	--	--	--------

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	07	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jasa perizinan kendaraan dinas yang terlaksana	125 kendaraan	86 kend	38 kend	38 kend	100,00	38 kend	38 kend	193 kend	154,00
1	07	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebutuhan jasa kebersihan kantor	130 orang, 5 tahun	83 orang	26 orang, 12 bulan	26 orang, 12 bulan	100,00	26 orang	26 orang	130 orang	120,00
1	07	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kebutuhan perbaikan peralatan kerja	5 jenis, 5 tahun	3 jenis	1 jenis, 1 tahun	1 jenis, 1 tahun	100,00	1 jenis	1 jenis	5 jenis	100,00
1	07	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	5 paket, 5 tahun	3 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	1 paket	5 paket	100,00
1	07	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan	15 paket, 5 tahun	9 paket,	3 paket, 1 tahun	3 paket, 1 tahun	100,00	3 paket	3 paket	15 paket	100,00
1	07	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan	20 jenis, 5 tahun	12 jenis	4 jenis, 1 tahun	4 jenis, 1 tahun	100,00	4 jenis	4 jenis	20 jenis	100,00
1	07	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
1	07	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan	10 jenis, 5 tahun	6 jenis,	2 jenis, 1 tahun	2 jenis, 1 tahun	100,00	3 jenis	3 jenis	10 jenis	100,00
1	07	01	16	Penyediaan Bahan Logistik	Jenis logistik	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1	07	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis makanan dan minuman	50 jenis, 5 tahun	30 jenis,	10 jenis, 1 tahun	10 jenis, 1 tahun	100,00	10 jenis	10 jenis	50 jenis	100,00
1	07	01	18	Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi di Dalam dan ke Luar Daerah	Pelaksanaan rapat	850 kali, 5 tahun	500 kali	1 tahun	1 tahun	100,00	1 tahun	1 tahun	850 kali, 5 tahun	100,00
1	07	01	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Jenis tenaga keamanan	155 jenis, 5 tahun	93 orang,	31 orang, 1 tahun	31 orang, 1 tahun	100,00	31 orang, 1 tahun	31 orang, 1 tahun	155 orang, 5 tahun	100,00

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>07</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<i>Meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan</i>									
1	07	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Roda 4	1 kend	3 kend	2 kend	2 kend	100,00	2 kend	2 kend	5 kend	500,00
1	07	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tempat sampah, AC, gerobak tarik, TV, Kamera, HP)	11 jenis	6 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	2 jenis	2 jenis	8 jenis, 5 tahun	72,72
1	07	02	10	Pengadaan Mebeler	Meja, kursi	58 unit, 15 jenis	6 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00	3 jenis	3 jenis	15 jenis	100,00
1	07	02	11	Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	Komputer PC, Laptop, Printer, mesin ketik	2 jenis	2 jenis	1 jenis	1 jenis	100,00	1 jenis	1 jenis	5 jenis	250,00
1	07	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	10 gedung, 5 tahun	6 unit	2 unit, 1 tahun	2 unit, 1 tahun	100,00	1 unit, 1 tahun	1 unit, 1 tahun	8 gedung, 5 tahun	80,00
1	07	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	130 kend	119 kend	38 kend	38 kend	100,00	38 kend	38 kend	157 kend	120,77
1	07	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	5 jenis, 5 tahun	4 jenis	3 jenis, 1 tahun	3 jenis, 1 tahun	100,00	3 jenis, 1 tahun	3 jenis, 1 tahun	9 jenis, 4 tahun	180,00
1	07	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	-	-	-	-	00,00	-	-	-	00,00
1	07	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan mebeleur	4 paket, 5 tahun	2 paket	1 tahun	1 tahun	100,00	1 tahun	1 tahun	4 paket, 5 tahun	80,00
1	07	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan	Pemeliharaan komputer dan	172 unit	104 unit	47 unit	47 unit	100,00	47 unit	47 unit	198 unit	115,00

				perlengkapannya	perlengkapannya									
1	07	02	44	Rehab Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan yang direhab	-	-	-	-	00,00	-	-	-	00,00

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>07</b>	<b>03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<i>Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur</i>									
1	07	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tercukupi	-	10 paket	10 paket	10 paket	100,00	10 paket	10 paket	0 paket	80,00
<b>1</b>	<b>07</b>	<b>05</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<i>Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</i>									
1	07	05	04	Pelatihan Teknis Pelaksanaan Tupoksi PD	Personil yang mengikuti kegiatan	250 orang	141 orang	91 orang	91 orang	100,00	100 orang	100 orng	241 orang	85,60
<b>1</b>	<b>07</b>	<b>06</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<i>Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan</i>									
1	07	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Tersusunnya laporan capaian kinerja PD (19 laporan, 4 buku)	110 laporan	62 laporan	31 laporan	31 laporan	100,00	31 laporan	31 laporan	125 laporan	113,64
1	07	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	5 laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	1 laporan	5 laporan	100,00
1	07	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan PD	5 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	1 laporan	5 laporan	100,00
1	07	06	09	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Tersusunnya laporan hasil monev	25 laporan	15 laporan	7 laporan	7 laporan	100,00	7 laporan	7 laporan	29 laporan	116,00
<b>1</b>	<b>07</b>	<b>09</b>		<b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran PD</b>	<i>Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran PD</i>	100%								
1	07	09	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	35 dokumen	14 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100,00	6 dokumen	6 dokumen	26 dokumen,	74,28
<b>1</b>	<b>07</b>	<b>15</b>		<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas</b>	<i>Terwujudnya pembangunan prasarana dan fasilitas</i>	100%								

				<b>Perhubungan</b>	<i>perhubungan</i>									
1	07	15	01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Kebutuhan prasarana dan fasilitas perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	07	15	02	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur bidang Perhubungan	SOP Dinas Perhubungan	5 kegiatan, 5 tahun	3 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	2 kgt	2 kgt	6 kgt	120,00
1	07	15	03	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Laporan pelaksanaan koordinasi bidang perhubungan	5 kegiatan, 5 tahun	3 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	1 kgt	1 kgt	5 kgt	100,00
1	07	15	04	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	Sosialisasi bidang perhubungan	10 kegiatan, 5 tahun	6 kgt	2 kgt	2 kgt	100,00	2 kgt	2 kgt	10 kgt	100,00
1	07	15	07	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Kegiatan pembinaan teknis terminal	10 kegiatan, 5 tahun	8 kgt,	1 kgt	1 kgt	100,00	1 kgt,	1 kgt	8 kgt	80,00
1	07	15	10	Peningkatan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan	Pembinaan teknis pada sector perparkiran	5 kegiatan	6 kgt	2 kgt	2 kgt	100,00	2 kgt	2 kgt	8 kgt	140,00
1	07	15	11	Inventarisasi Data Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Inventarisasi data kinerja perhubungan	5 kegiatan	3 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	1 kgt	1 kgt	5 kgt	100,00
1	07	15	12	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Tersedianya terminal angkutan penumpang		3 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	1 kgt	1 kgt	4 kgt	80,00
<b>1</b>	<b>07</b>	<b>16</b>		<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	<i>Prasarana dan fasilitas perhubungan yang terpelihara dengan baik</i>	<i>100%</i>								
1	07	16	01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya alat uji kendaraan bermotor	10 kgt, 5 tahun	6 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	1 kgt	1 kgt	8 kgt	80,00
1	07	16	02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya balai uji kendaraan	5 gedung	3 gedung	1 gedung	1 gedung	100,00	1 gedung	1 gedung	5 gedung	100,00

					bermotor									
1	07	16	04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Terpeliharanya terminal	8 terminal	4 terminal	-	-	0,00	-	-	4 terminal	45,00
1	07	16	05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Terpeliharanya rambu lalu lintas	20 jenis, 5 tahun	12 jenis	4 jenis,	4 jenis	100,00	4 jenis	4 jenis	20 jenis	100,00
1	07	16	08	Rehabilitasi/pemeliharaan Halte	Pengembangan Halte dan shelter	5 kegiatan	3 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	1 paket	1 paket	6 kgt	120,00
1	07	16	09	Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlintasan KA	Pos jaga perlintasan	10 jenis	6 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	2 jenis	2 jenis	10 jenis	100,00
<b>1</b>	<b>07</b>	<b>17</b>		<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<i>Meningkatnya pelayanan angkutan</i>	<i>100%</i>								
1	07	17	01	Kegiatan Penyuluhan bagi para Sopir/Juru Mudi untuk Keselamatan Penumpang	Kegiatan penyuluhan	-	-	-	-	-	-	-	-	00,00
1	07	17	03	Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang	Temu wicara pengelola angkutan umum	2 kegiatan	-	-	-	00,00	-	-	-	00,00
1	07	17	04	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna Keselamatan Penumpang	Terlaksananya pemeriksaan kelaikan jalan kendaraan	5 kgt, 5 tahun	3 kgt	2 kgt	2 kgt	100,00	2 kgt	2 kgt	6 kgt	120,00
1	07	17	05	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum	Terlaksananya operasi laik jalan	150 kali, 5 tahun	90 kali	30 kali, 1 tahun	30 kali, 1 tahun	100,00	30 kali, 1 tahun	30 kali, 1 tahun	150 kali, 4 tahun	100,00

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	07	17	06	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	Pelaksanaan pengamanan di lingkungan terminal	11 kegiatan	7 kgt	3 kgt	3 kgt	100,00	3 kgt	3 kgt	13 kegiatan	118,00
1	07	17	09	Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal A	Terlaksanannya pemeliharaan kebersihan terminal	35 jenis	26 terminal	4 terminal, 1 tahun	4 terminal, 1 tahun	100,00	4 terminal, 1 tahun	4 terminal, 1 tahun	26 terminal, 5 tahun	74,28
1	07	17	11	Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan	Terlaksanannya kegiatan analisis jaringan trayek Angkutan	5 kegiatan	3 kegiatan	1 kgt, 1 dokumen	1 kgt, 1 dokumen	100,00	1 dokumen	1 dokumen	5 kegiatan, 5 dokumen	50,00
2	09	17	12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Terlaksanannya kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	5 kegiatan	3 kegiatan	1 kgt, 12 bulan	1 kgt, 12 bulan	100,00	1 kegiatan	1 kegiatan	5 kgt	100,00
1	07	17	13	Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan	Pelayanan perijinan angkutan bidang perhubungan	5 kegiatan	3 kgt	1 kgt, 12 bulan	1 kgt, 12 bulan	100,00	1 kegiatan	1 kegiatan	5 kgt, 60 bulan	100,00
1	07	17	14	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Terlaksanannya pemilihan dan pengiriman pelajar pelopor keselamatan lalu lintas jalan	5 kegiatan	1 kegiatan	-	-	00,00	-	-	1 kegiatan	20,00
1	07	17	15	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Angkutan Umum Teladan	Terlaksanannya pemilihan dan pengiriman peserta AKUT ke tingkat provinsi	5 kegiatan	3 kegiatan	1 kgt, 20 peserta	1 kgt, 20 peserta	100,00	1 kgt, 20 peserta	1 kgt, 20 peserta	5 kegiatan, 100 peserta	100,00
1	07	17	16	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Terlaksanannya koordinasi peningkatan angkutan umum	5 kegiatan	3 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	1 kgt	1 kgt	5 kegiatan	100,00
1	07	17	18	Kegiatan Penciptaan Disiplin	Terlaksanannya	20	12	4	4	100,00	4 terminal,	4	20	100,00



				dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal B	pemeliharaan kebersihan terminal	terminal	terminal	terminal, 1 tahun	terminal, 1 tahun		1 tahun	terminal, 1 tahun	terminal	
1	07	17	19	Sosialisasi Peningkatan Keselamatan Transportasi Jalan	Terlaksananya sosialisasi/pembinaan ketertiban dan keselamatan lalu lintas jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	00,00
<b>1</b>	<b>07</b>	<b>18</b>		<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	<i>Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</i>	<i>100%</i>								
1	07	18	01	Pembangunan Gedung Terminal	Tersediannya pembangunan terminal angkutan barang	1 kegiatan, 10 dok	1 kgt	-	-	00,00	-		1 kgt, 1 dokumen	80,00

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	07	18	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	Pintu Perlintasan KA	-	-	1	1	100,00	-		-	40,00
<b>1</b>	<b>07</b>	<b>19</b>		<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	<i>Meningkatnya ketertiban masyarakat berlalu lintas</i>	<i>100%</i>								
1	07	19	01	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Tersedianya rambu lalu lintas	10 kegiatan	6 kgt	3 kgt	3 kgt	100,00	2 kgt	2 kgt	12 kgt	120,00
1	07	19	02	Pengadaan Marka Jalan	Terbuatnya marka jalan	5 paket, 5 tahun	3 paket	1 paket	1 paket	100,00	3 paket	3 paket	7 paket	140,00
1	07	19	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan jalan	10 jenis, 5 tahun	6 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	2 jenis	2 jenis	12 jenis	120,00
1	07	19	05	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas di Jalan	Terlaksananya pengamanan lalu lintas	10 kgt, 5 tahun	6 kgt	3 kgt	3 kgt	100,00	3 kegiatan	3 kegiatan	11 kgt	110,00
1	07	19	06	Koordinasi dalam Peningkatan Pengendalian dan	terlaksananya kegiatan analisis jaringan trayek	25 kali, 5 tahun	15 kgt	5 kali	5 kali	100,00	1 kegiatan	1 kegiatan	5 kgt	100,00

				Pengamanan Lalu Lintas															
--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pada tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya mendapatkan Anggaran Belanja sebesar Rp 7.039.100.000,00 untuk melaksanakan 54 kegiatan dengan realisasi anggaran mencapai 96,55% dengan capaian program 100%.

Pada sektor belanja dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2020 masih terdapat 11 (sebelas) kegiatan dimana capaian realisasi belanja masih di bawah target (85%). Hal ini dikarenakan adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan, maupun karena pelaksanaan kegiatan yang kurang tepat, sehingga tidak sesuai dengan DPA yang ada.

Adapun kendala teknis yang dihadapi yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran belanja adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa surat-menyurat

Capaian realisasi 81,65%, Belanja jasa surat menyurat tidak terserap karena jumlah surat yang dikirim tidak sesuai dengan target jumlah surat yang ditetapkan pada penetapan anggaran.

2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Capaian realisasi 76,95%. Belanja pengisian tinta mesin foto copy tidak terserap dikarenakan volume foto copy data-data kantor lebih sedikit dari yang direncanakan.

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Realisasi anggaran sebesar 84,15 %, Pada belanja pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kami anggarkan untukantisipasi denda keterlambatan pembayaran pajak, tetapi pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada STNK.

4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Capaian realisasi 12,61%. Hal ini disebabkan karena volume pemakaian peralatan kerja selama tahun 2020 menurun drastis karena berkurangnya volume pekerjaan yang disebabkan adanya pandemi covid 19, sehingga perbaikan peralatan kerja juga tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan.

5. Penyediaan makanan dan minuman

Pada kegiatan penyediaan makanan dan minuman serapannya sebesar 70,48 % hal ini dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah untuk melaksanakan Work From Home (WFH) sehingga penyediaan makanan dan minuman tidak terserap maksimal.

6. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Serapan pada kegiatan pengadaan perlengkapan Gedung kantor sebesar 52,09 % hal ini di sebabkan karena pengadaan pompa air, torn untuk panampungan air di Dinas Perhubungan Kab. Pematang Jaya, tetapi pada pelaksanaan telah di masukkan ke dalam kontrak Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan (JEJ)

7. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur terserap sebesar 65,33 % hal ini di sebabkan mebeleur yang seharusnya di pelihara masih dalam kondisi baik sehingga biaya pemeliharaan mebeleur tidak terserap maksimal

8. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Pada kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD seraan tahun 2020 sebesar 72,60% Belanja makan minum rapat yang telah di anggarkan tidak dapat terserap maksimal karena adanya pembatasan kerumunan

9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Penyebab serapan tidak maksimal pada kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Volume adalah pada perjalanan dinas dalam daerah berkurang karena adanya pembatasan kegiatan adanya pandemi covid-19

10. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD

Volume perjalanan dinas dalam daerah berkurang karena adanya pembatasan kegiatan adanya pandemi covid-19 menjadi penyebab tidak maksimalnya serapan pada kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD.

11. Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan

Kegiatan Pengumpulan dan analisis data base dengan serapan 78,56% hal ini di sebabkan karena pelayanan angkutan Belanja telpon tidak terserap maksimal karena di anggarkan lebih besar dari kebutuhan

Informasi di atas diharapkan dapat dijadikan catatan dalam pengambilan keputusan terutama untuk perencanaan kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik memenuhi target kinerja yang diharapkan.

Diperlukan adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antar bidang dan sekretariat terutama dalam penatausahaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan sesuai dengan DPA.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bahwa Dinas Perhubungan pada dasarnya mengampu satu bidang urusan yaitu urusan Perhubungan maka sesuai dengan urusan yang dibebankan tersebut maka Dinas Perhubungan berdasarkan kewenangannya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

### **1. Kewenangan, Tugas Pokok, dan Fungsi**

#### **a. Kewenangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, bahwa kewenangan desentralisasi yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang adalah Bidang Perhubungan.

#### **b. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang, berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

#### **c. Fungsi**

Didalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 5) Pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang merupakan salah satu dinas daerah yang mempunyai tugas pokok “Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perhubungan”, oleh karena itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang harus dapat memberikan pelayanan umum sebaik-baiknya kepada masyarakat baik pelayanan administratif maupun pelayanan teknis guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## 2. Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, pelayanan yang dapat diberikan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang meliputi :

### a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang telah menyediakan pelayanan Angkutan Umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan dan jaringan trayek berupa Angkutan Perkotaan (137 kendaraan dalam 10 trayek), Angkutan Perdesaan (325 kendaraan dalam 20 trayek), Angkutan Perbatasan (30 kendaraan dalam 3 trayek). Selain itu juga tersedia bus yang melayani antar kota berupa Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), dan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP).

Perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang terdiri dari Izin Trayek dan Izin Insidentil. Angkutan Umum dalam trayek yang ada di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

#### 1) Angkutan Perkotaan

Tabel Trayek Angkutan Perkotaan

No	Trayek	Jumlah
1.	A : Terminal Induk – Sumberharjo PP	11
2.	B : Terminal Induk – Petarukan PP	26
3.	C : Terminal Induk – Widuri PP	6
4.	D : Terminal Induk – Sumberharjo PP	9
5.	E : Terminal Induk – Petarukan PP	25
6.	F : Terminal Induk – Sungapan PP	16
7.	G : Terminal Induk – Banjarmulya PP	10
8.	G1 : Terminal Induk – Banjarmulya PP	13
9.	H : Terminal Induk – Loning PP	14
10.	I : Terminal Induk – Jebed PP	15

## 2) Angkutan Perdesaan

Tabel Trayek Angkutan Perdesaan

No	Trayek	Jumlah
Berpusat di <b>Petarukan</b> :		
1.	Petarukan – Karangasem – Comal PP	11
2.	Klareyan – Petarukan – Pener PP	21

Tabel Trayek Angkutan yang Berpusat di Comal, Randudongkal, Moga, Warungpring, dan Bantarbolang

No	Trayek	Jumlah
Berpusat di <b>Comal</b> :		
1.	Comal – Tegalsari – Banjardawa PP	18
2.	Comal – Kaliwadas – Cikadu PP	20
3.	Comal – Pesantren – Petarukan PP	25
4.	Comal – Kaliprau – Blendung PP	15
5.	Comal – Pamutih – Blendung PP	10
6.	Comal – Mojo – Blendung PP	15
7.	Comal – Kebojongan PP	6
Berpusat di <b>Randudongkal</b> :		
1.	Randudongkal – Tanahbaya PP	29
2.	Randudongkal – Bantabolang PP	10
3.	Randudongkal – Watukumpul PP	10
4.	Randudongkal – Warungpring PP	33
5.	Randudongkal – Belik – Cikadu PP	25
6.	Randudongkal – Kecepit– Moga PP	22
Berpusat di <b>Moga</b> :		
1.	Moga – Karangsari – Simpar PP	10
2.	Moga – Pulosari – Belik PP	8
3.	Moga – Mandiraja – Warungpring PP	19
Berpusat di <b>Bantarbolang</b> :		
1.	Bantarbolang – Kuta - Ps. Pagi PP	12
2.	Bantarbolang – Kesesirejo PP	10

Sedangkan perizinan yang dikeluarkan adalah sebagai berikut :

Tabel Jenis Perizinan

No	Jenis Perizinan	Tahun 2018
1.	Izin Trayek	62
2.	Izin Insidentil	0
Jumlah		62

Dibanding tahun sebelumnya, permintaan Izin Insidentil berkurang, hal ini dapat disebabkan karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan bus pariwisata maupun kendaraan pribadi dalam bepergian untuk keperluan wisata maupun keluarga.

Disamping telah tersedia angkutan umum dalam trayek, di Kabupaten Pemalang terdapat angkutan tidak dalam yang terdiri dari :

1) Angkutan taksi

Pada Tahun 2016 di Kabupaten Pemalang telah direalisasikan mobil penumpang berupa taksi untuk melayani masyarakat yang membutuhkan taksi. Saat ini baru terealisasi sebanyak 4 unit kendaraan dari rencana target sebanyak 30 unit, melihat kondisi kebutuhan masyarakat.

2) Angkutan barang untuk penumpang

Angkutan ini melayani daerah-daerah terpencil (pegunungan) dengan daerah-daerah yang telah berkembang (ibukota kecamatan) berupa kendaraan angkutan barang. Hal ini karena kultur/kebiasaan masyarakat setempat yang masih membutuhkan angkutan barang sebagai angkutan penumpang. Daerah-daerah yang masih terdapat angkutan barang sebagai angkutan penumpang antara lain di daerah : Watukumpul, Belik, Pulosari, Moga, Warungpring, Randudongkal, dan Bantarbolang.

b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang menyediakan prasarana/fasilitas angkutan jalan berupa : halte, shelter dan terminal.

Untuk tahun 2020 jumlah halte 24 buah, shellter 3 buah dengan kondisi baik.



Sedangkan jumlah terminal penumpang yang ada sebanyak 8 buah, terdiri dari : Terminal Randudongkal, Terminal Moga, Terminal Belik, Terminal Warungpring, Terminal Angkot Pemalang, Terminal Petarukan, dan Terminal Comal dan Terminal Grosir Comal.

Agar dapat tetap berfungsi dengan baik, diperlukan adanya pelaksanaan kegiatan pemeliharaan terminal dan peningkatan fungsi terminal.

c. Fasilitas Perlengkapan Jalan

Guna mendukung keselamatan transportasi jalan, Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas, Pengadaan Marka Jalan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian, dan Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas.

Fasilitas perlengkapan jalan yang telah dipasang Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang baik di jalan Kabupaten, jalan Provinsi, maupun jalan Nasional adalah sebagai berikut :

Tabel Jenis Fasilitas Perlengkapan Jalan

No	Jenis Fasilitas dan Perlengkapan Jalan	Sampai dengan Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	RPPJ	50	146		24	-	7	4
2.	Rambu R-60	50	1074	296	-	118	-	-
3.	Rambu R-40	-	-	-	-	-	-	-
4.	Rambu R-45	-	47	-	-	-	-	-
5.	Rambu R-90	-	6	-	-	-	-	-
6.	Rambu Penunjuk Jurusan	-	21	-	-	-	-	-
7.	Rambu Petunjuk Jalur Alternatif	-	48	-	-	-	-	-
8.	Rambu Sementara	-	-	25	-	-	-	-
	Rambu Elektronik	-	-	1	-	-	-	-
9.	Papan Nama Jalan	-	122	-	-	-	-	-
10.	Rambu Himbauan	-	3	-	-	10	-	-
11.	Delineator	-	90	-	-	-	-	-
12.	Guardrail	-	487	3 beam	-	-	22 beam	-
13.	Cermin Tikungan	9	19	6	-	-	2	-
14.	Marka Jalan	255	6739 m2	1301 m2	436 m2	1731 m2	400 m2	1200 m2
15.	Halte	-	13	1	2	3	-	-
16.	Shelter		3	-	-	-	-	-
17.	Traffic Light	1	12	3	1	2	2	-
18.	Warning Light	7	29	11	-	5	-	-
19.	Counterdown Timer	-	12	-	-	-	-	-
20.	Pita Kejut	-	-	3	3	-	-	-
21.	Pintu Perlintasan KA	-	-	3	1	2	-	-

Selain kegiatan yang telah dilakukan seperti tersebut di atas, masih banyak hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya, mengingat masih adanya kekurangan atau hal-hal yang harus dilakukan, antara lain :

- 1) Kondisi APILL (traffic light) yang sudah tua memerlukan adanya pembaharuan/penggantian. Namun dikarenakan terletak pada jalan nasional dan provinsi pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi penggantian APILL menjadi sulit, dan harus memerlukan koordinasi yang lebih baik.
- 2) Sudah pudar/hilangnya marka jalan dan *zebracross*, terutama yang terdapat di jalan-jalan protokol ibukota kabupaten dan di depan sekolah-sekolah;
- 3) Kurang tertibnya parkir yang ada di badan jalan dan di jalan-jalan protokol yang melalui kawasan/pusat perdagangan di ibukota kabupaten;
- 4) Masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas untuk jalan-jalan kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan di wilayah Kabupaten Pematang Jaya, mengingat kondisi geografis Kabupaten Pematang Jaya bagian Selatan yang berupa dataran tinggi banyak memerlukan rambu lalu lintas sebagai petunjuk dan peringatan bagi para pengguna jalan demi keamanan dan keselamatan berlalu lintas;
- 5) Hilangnya beberapa rambu lalu lintas yang telah dipasang dikarenakan masing kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya rambu lalu lintas bagi pengguna jalan.
- 6) Masih banyak dibutuhkan pengaman jalan khususnya di wilayah bertebing curam dan tanjakan maupun penurunan jalan yang tajam;
- 7) Perlunya koordinasi dalam pembangunan dan peningkatan keselamatan lalu lintas pada perlintasan sebidang.
- 8) Belum adanya masterplan lalu lintas di Kabupaten Pematang Jaya, sehingga pemasangan rambu lalu lintas hanya berdasarkan pada hal yang mendesak dan penggantian rambu yang sudah ada.

d. Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya memberikan pelayanan teknis berupa Pemeriksaan/Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang bertujuan Untuk mengetahui kondisi laik/tidaknya kendaraan bus/barang yang akan

beroperasi di jalan dan sebagai kelengkapan kendaraan, dan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang sudah mendapatkan akreditasi B.

Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) di wilayah Kabupaten Pemalang pada Tahun 2020 sudah mencapai 8.930 lebih kendaraan. Oleh karena itu, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang melaksanakan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan prasarana berupa 1 gedung balai pengujian kendaraan bermotor dan sarana berupa 9 set alat pengujian kendaraan bermotor. Untuk menjamin kelancaran dan keakuratan peralatan uji tersebut, dilakukan kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi alat uji.

Selain kegiatan di atas, hal yang juga penting adalah diperlukannya suatu sistem informasi manajemen yang mendukung kinerja pengujian kendaraan bermotor berupa software atau aplikasi penyimpanan data pengujian kendaraan bermotor. Pada akhir tahun 2014, Dinas Perhubungan memperoleh bantuan software pengujian kendaraan bermotor. Hal ini sangat membantu dalam penyusunan pelaporan pengujian kendaraan bermotor. Diharapkan pada tahun 2018 dapat berfungsi dengan baik.

Dari jumlah kendaraan yang melakukan uji berkala tersebut, diperoleh data jumlah KBWU dan Kendaraan yang melakukan uji berkala di Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Kendaraan Wajib Uji Kabupaten Pemalang

Jenis Kendaraan	KBWU							Kendaraan yang Diuji						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mobil Barang								10,728	10,955	10,880		11,830	8.801	
Bus								1,154	1,078	1,173		943	1.031	
Jumlah	6,098	5,158	7,560	7,489	8,544	8.930	9109	11,882	12,033	12,053	11,704	12,773	9.832	

Untuk satu kali Pemeriksaan/Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor berlaku untuk 6 (enam) bulan, sehingga dalam satu tahunnya dilakukan dua kali pengujian terhadap masing-masing kendaraan.

Dari semua kendaraan yang diuji tersebut, dapat diperoleh data Tahun 2020 bahwa di Kabupaten Pemalang terdapat 8.930 Kendaraan Bermotor Wajib Uji atau sebanyak 17.860 kali pengujian, dan yang melakukan uji berkala

9.832 kendaraan atau sebanyak 55,05%, angka prosentase tersebut menunjukkan bahwa target pelaksanaan uji kendaraan tidak tercapai target kendaraan yang telah ditetapkan di Tahun 2020.

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam pengujian kendaraan masih rendah.

e. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menunjang pelayanan bidang perhubungan pada umumnya diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan handal agar dapat memberikan pelayanan lebih baik. Jumlah SDM bidang perhubungan, berdasarkan SPM ini terdiri dari :

- 1) Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran (UTPP) dari 8 unit terminal dan Perparkiran yang ada, SDM yang bertugas sebanyak 64 orang; terdiri dari 26 orang PNS dan 38 orang non PNS
- 2) Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor. Pada seksi Pengujian Kendaraan Bermotor SDM yang ada terdiri dari 8 orang Penguji, 5 PNS dan 3 non PNS, 6 orang petugas Administrasi/Teknis Pengujian terdiri dari 2 orang PNS dan 4 non PNS, dan 3 orang petugas Pendukung Teknis Pengujian terdiri dari 1 orang PNS dan 2 orang non PNS.
- 3) Bidang MRL, Evaluasi Andalalin dan Pengelolaan Parkir terdiri dari : 15 orang yang bertugas dalam bidang MRL dan Evaluasi Andalalin terdiri dari 3 orang PNS dan 12 orang non PNS, kemudian 11 orang yang bertugas pada pengelolaan parkir yang terdiri dari 4 orang PNS dan 7 orang non PNS
- 4) Pengawas Kelaikan Jalan. SDM yang bertugas sebagai pengawas kelaikan jalan berjumlah 2 orang, sayangnya masih belum memiliki kompetensi dalam hal pengawasan kelaikan jalan. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya pelatihan teknis untuk diklat PPNS bidang Perhubungan.

f. Keselamatan

Saat ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya belum menetapkan standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek yang ada. Untuk keselamatan di jalan terutama pada perlintasan sebidang dengan KA, Dinas Perhubungan sudah mengadakan peningkatan sarana pengamanan perlintasan KA dari yang semula bambu menjadi pintu perlintasan semi

otomatis. Untuk peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang sedang diupayakan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan )Kabupaten Pematang**

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra DISHUB				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	surat yang terkirim dengan baik			3.500 surat	3.500 surat	3.500 surat	3.500 surat	100,00	100,00	86,56	100,00	
2	sumber daya yang tercukupi			3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	jumlah perizinan kendaraan dinas			25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	100,00	100,00	154,00	100,00	
5	jumlah petugas kebersihan			26 orang, 2 jenis	26 orang, 2 jenis	26 orang, 2 jenis	26 orang, 2 jenis	100,00	100,00	120,00	100,00	
6	perbaikan peralatan kerja			1 jenis, 1 tahun	1 jenis, 1 tahun	1 jenis, 1 tahun	1 jenis, 1 tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	kebutuhan atk			1 paket, 1 tahun	1 paket, 1 tahun	1 paket, 1 tahun	1 paket, 1 tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	kebutuhan barang cetakan			3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	kebutuhan komponen listrik			4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	kebutuhan bahan bacaan			2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	kebutuhan makanan minuman			10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	Rapat-rapat yang dapat dihadiri			170 kali, 1 tahun	170 kali, 1 tahun	170 kali, 1 tahun	170 kali, 1 tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	kebutuhan jasa keamanan			31 orang ,1 jenis	31 orang ,1 jenis	31 orang ,1 jenis	31 orang ,1 jenis	100,00	100,00	100,00	100,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Tersedianya kendaraan dinas			1 unit	-	-	-	100,00	-	500,00	-	
15	Tersedianya perlengkapan gedung kantor			2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	100,00	72,72	100,00	
16	Tersedianya mebeleur			3 jenis	3 jenis,	3 jenis	3 jenis	100,00	100,00	100,00	100,00	

					58 unit							
17	Tersedianya komputer dan perlengkapannya			2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	100,00	250,00	100,00	
18	Terpeliharanya gedung kantor			2 gedung	2 gedung	2 gedung	2 gedung	100,00	100,00	80,00	100,00	
19	Terpeliharanya kendaraan dinas			1 tahun, 26 kend	1 tahun, 26 kend	1 tahun, 26 kend	1 tahun, 26 kend	100,00	100,00	120,77	100,00	
20	Terpeliharaan perlengkapan gedung kantor			1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100,00	100,00	180,00	100,00	
21	Terpeliharanya mebel			1 paket, 1 tahun	1 paket, 1 tahun	1 paket, 1 tahun	1 paket, 1 tahun	100,00	100,00	80,00	100,00	
22	Terpeliharanya komputer dan perlengkapannya			36 unit	36 unit	47 unit	36 unit	100,00	100,00	115,00	100,00	
23	Terlaksananya pelatihan tupoksi			1 kgt, 50 orang	1 kgt, 50 orang	1 kgt, 50 orang	1 kgt, 50 orang	100,00	100,00	86,60	100,00	
24	Tersusunnya laporan kinerja			22 lap	22 lap	31 lap	22 lap	100,00	100,00	113,00	100,00	
25	Tersusunnya laporan keuangan semesteran			1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100,00	100,00	100,00	100,00	
26	Tersusunnya laporan keuangan SKPD akhir tahun			1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100,00	100,00	100,00	100,00	
27	Terlaksananya MONEV			5 laporan	5 laporan	7 laporan	5 laporan	100,00	100,00	116,00	100,00	
28	Tersusunnya rencana kerja dan anggaran			5 dok	5 dok	6 dok	5 dok	100,00	100,00	74,28	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Tersusunnya kebijakan, norma, standar dan prosedur			1 kgt	1 kgt	2 kgt	1 kgt	100,00	100,00	120,00	100,00	
30	Terlaksananya koordinasi bidang perhubungan			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	
31	Terlaksananya sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan			2 kgt	2 kgt	2 kgt	2 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Terlaksananya peningkatan kinerja terminal			2 kgt	2 kgt	1 kgt	2 kgt	100,00	100,00	80,00	100,00	

33	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi perparkiran			1 kgt	1 kgt	2 kgt	1 kgt	100,00	100,00	140,00	100,00	
34	Terlaksananya inventarisasi sarana prasarana dan fasilitas LLAJ			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	
35	Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	80,00	100,00	
36	Kalibrasi dan terpeliharanya alat uji kendaraan bermotor			1 tahun, 2 kgt	1 tahun, 2 kgt	1 tahun, 2 kgt	1 tahun, 2 kgt	100,00	100,00	80,00	100,00	
37	Terpeliharanya balai pengujian kendaraan bermotor			1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100,00	100,00	100,00	100,00	
38	Terpeliharanya terminal			3 terminal	3 terminal	4 terminal	3 terminal	100,00	100,00	45,00	100,00	
39	Terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas			4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100,00	100,00	100,00	100,00	
40	Terpeliharanya halte			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	120,00	100,00	
41	Terpeliharanya sarana prasarana perlintasan KA			2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	100,00	100,00	100,00	
42	Terlaksananya kegiatan temu wicara			2 kgt	-	-	-	100,00	-	-	-	
43	Tersedianya data kinerja pengujian kendaraan bermotor			-1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	
44	Terlaksananya operasi laik jalan dan tertib administrasi kendaraan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	100,00	100,00	100,00	
45	Terlaksananya pengamanan di terminal			3 kgt	3 kgt	3 kgt	3 kgt	100,00	100,00	118,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan di terminal A			4 terminal, 1 tahun	4 terminal, 1 tahun	4 terminal, 1 tahun	4 terminal, 1 tahun	100,00	100,00	74,28	100,00	
47	Tersusunnya data base pelayanan angkutan			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	50,00	100,00	
48	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan angkutan umum			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	



49	Terlaksananya fasilitasi bidang perizinan			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	
50	Terlaksananya pemilihan pelajar pelopor bidang transportasi darat			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	20,00	100,00	
51	Terlaksananya pemilihan dan pengiriman AKUT			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	
52	Terlaksananya koordinasi angkutan umum			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	
53	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan terminal B			4 terminal	4 terminal	4 terminal	4 terminal	100,00	100,00	100,00	100,00	
54	Tersedianya pembangunan terminal angkutan barang			1 kegiatan		-	-	100,00	-	80,00	-	
55	Tersedianya rambu lalu lintas			2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	100,00	120,00	100,00	
56	Terbuatnya marka jalan			1 paket	1 paket	3 paket	1 paket	100,00	100,00	140,00	100,00	
57	Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan jalan			2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	100,00	100,00	100,00	
58	Terlaksananya pengamanan lalu lintas			3 kgt	3 kgt	3 kgt	3 kgt	100,00	100,00	110,00	100,00	
59	Terlaksananya koordinasi tim lalu lintas kabupaten (traffic board)			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang merupakan Perangkat Daerah penunjang Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. Dengan demikian Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang merupakan "*supporting unit*" bagi organisasi perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Sesuai dengan hal tersebut maka tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang meliputi :

- a. Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yaitu
  - 1) Penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;
  - 2) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten
  - 3) Pengelolaan terminal penumpang tipe C,
  - 4) Penerbitan izm penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir,
  - 5) Pengujian berkala kendaraan bermotor,
  - 6) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lmtas untuk janngan jalan Kabupaten,
  - 7) Persetujuan hasil analisis dampak lalu lmtas untuk jalan kabupaten,
  - 8) Audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lmtas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di jalan Kabupaten,
  - 9) Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah,
  - 10) Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah,
  - 11) Penetapan rencana umum janngan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah,
  - 12) Penetapan rencana umum janngan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah,
  - 13) Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasma berada dalam Daerah,
  - 14) Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

- 15) Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah,
  - 16) Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah
- b. Sub Urusan Pelayaran, yaitu :
- 1) Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah,
  - 2) Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah,
  - 3) Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha,
  - 4) Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah,
  - 5) Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha,
  - 6) Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan daerah dan/ atau jaringan,
  - 7) Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah,
  - 8) Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
  - 9) Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah,
  - 10) Penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal, pelabuhan sungai dan danau,
  - 11) Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pelabuhan sungai dan danau,
  - 12) Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal,

- 13) Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal,
  - 14) Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal,
  - 15) Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal,
  - 16) Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal,
  - 17) Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal
- c. Sub Urusan Penerbangan yaitu Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
- d. Sub Urusan Perkeretaapian yaitu:
- 1) Penetapan rencana induk perkeretaapian daerah
  - 2) Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah,
  - 3) Penetapan jaringanjalur kereta api yang jaringannya dalam 1(satu) daerah,
  - 4) Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api,
  - 5) Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah,
  - 6) Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian,
  - 7) Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- 2) Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.
- 3) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan.
- 4) Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi bidang Perhubungan.
- 5) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perhubungan.

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1. Isu dan Masalah Mendesak

Isu dan permasalahan yang mendesak saat ini berkenaan dengan bidang perhubungan di wilayah Kabupaten Pematang Jaya adalah sebagai berikut :

- a. Sistem konektivitas antar wilayah belum optimal antara lain kurangnya pelayanan angkutan umum di Kabupaten Pematang Jaya sehingga perlu adanya pembinaan terhadap layanan angkutan umum, perlu adanya pembaharuan jaringan trayek serta perlu dilakukannya pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan umum. Kemudian masih rendahnya efektivitas simpul transportasi di terminal sehingga perlu ditingkatkannya kualitas sarana prasarana terminal sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan, perlu dibangunnya terminal bongkar muat dan penambahan kapasitas SDM pengelola terminal dan belum adanya pelabuhan pengumpan lokal dikarenakan belum terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis perizinan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal.
- b. Potensi Kemacetan di kawasan perkotaan antara lain Manajemen lalu lintas di perkotaan belum optimal sehingga perlu dilakukan pengoptimalan dalam pengelolaan sarana prasarana perlengkapan lalu lintas, perlu dilakukan pengoptimalan terhadap manajemen dan SDM pengelola parkir, perlu dilakukan penanganan atau upaya terhadap titik-titik rawan kemacetan di perkotaan pada jam tertentu serta dilakukan upaya manajemen rekayasa lalu lintas yang baik terhadap gangguan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan baru di jalan kabupaten.
- c. Tingginya potensi kecelakaan lalu lintas dikarenakan masih rendahnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) untuk melakukan uji berkala sehingga perlu dilakukan adanya tindakan atau sanksi administrasi terhadap keterlambatan pengujian berkala KBWU serta belum terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan sehingga perlu dilakukan upaya pemenuhan terhadap fasilitas perlengkapan keselamatan jalan dan pemasangan palang pintu di semua perlintasan sebidang
- d. Letak Kabupaten Pematang Jaya yang dilalui oleh jalan nasional (Jalur Pantura) dan jalan provinsi dengan volume lalu lintas yang padat

memerlukan penanganan serius demi keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Untuk itu, diperlukan adanya peningkatan jumlah dan kualitas perlengkapan jalan yang ada seperti : APILL (*traffic light*), Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Pagar Pengaman Jalan (*Guardrail*), Patok Pengaman Jalan (*Delineator*), Cermin Tikungan, Warning Lamp. Namun demikian, adanya penanganan yang berjenjang berdasarkan kewenangan yang ada pada jalan nasional maupun jalan provinsi menyulitkan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dalam usaha memenuhi perlengkapan jalan yang ada pada jalan nasional dan jalan provinsi, baik yang terletak pada ibukota kabupaten maupun yang berada di luar ibukota.

- e. Peningkatan keselamatan lalu lintas pada perlintasan sebidang menjadi isu strategis saat ini, karena pembangunan, peningkatan, maupun penutupan jalan perlintasan sebidang pada jalan kabupaten menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Akan tetapi koordinasi yang panjang menyulitkan pemerintah kabupaten dalam usaha mewujudkan peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang.
- f. Dengan adanya amanat untuk mendukung program Pengarusutamaan Hak Anak, maka Dinas Perhubungan perlu mewujudkan program tersebut dalam usaha peningkatan keselamatan di sekolah-sekolah dalam bentuk pembuatan *zebra cross* atau zona selamat sekolah dan pemasangan rambu-rambu di sekitar sekolah.
- g. Diperlukannya suatu dukungan data dalam pembangunan. Dengan tersedianya data, dapat diketahui perkembangan pelaksanaan tugas suatu organisasi. Dinas Perhubungan memerlukan adanya data-data pembangunan di bidang perhubungan. Dalam bidang perhubungan, data yang diperlukan ada diantaranya :
  - Data sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan, berupa data angkutan umum, data prasarana perhubungan, data perlengkapan jalan, data kinerja jalan;
  - Data bus dan penumpang yang ada di terminal;
  - Data kendaraan bermotor wajib uji dan data pengujian kendaraan bermotor.

Memperhatikan kondisi ideal dan isu yang berkembang, maka masalah mendesak yang dihadapi antara lain :

a. Bidang Perhubungan

Permasalahan yang muncul pada bidang perhubungan adalah:

- 1) Bidang Lalu Lintas Jalan
  - a) Masih diperlukannya pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan terpasang di Ruas Jalan Kabupaten;
  - b) Masih diperlukannya pemenuhan data fasilitas perlengkapan jalan terpasang di ruas jalan kabupaten, Provinsi dan Nasional di Kabupaten Pemalang ;
  - c) Masih rendahnya pemahaman keselamatan utamanya para pengemudi angkutan umum
- 2) Bidang Angkutan jalan
  - a) Rendahnya jumlah angkutan umum kewenangan Pemerintah Kabupaten yang sesuai dengan SPM;
  - b) Masih diperlukannya fasilitasi penambahan rute/trayek angkutan aglomerasi perkotaan dan angkutan perintis;
  - c) Masih rendahnya pengguna angkutan umum pada angkutan perdesaan dan angkutan perkotaan di Kabupaten Pemalang
  - d) Masih beroperasinya angkutan bak terbuka untuk mengangkut penumpang, yang tidak sesuai standar
- 3) Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
  - a) Masih rendahnya nilai IKLI pada Terminal Penumpang Tipe C di Kabupaten Pemalang;
  - b) Masih diperlukannya pemenuhan fasilitas keselamatan di Perlintasan Kereta Api;

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Proses Rancangan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2020 berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2019 yang telah disusun berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Pemalang (RPJMD 2016 – 2021) yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah juga mendasari pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah 2016 – 2021 yang telah disahkan pula. Hal tersebut sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pada Rancangan Awal RKPD 2018 dimana besarnya anggaran yang direncanakan oleh Dinas Perhubungan

disesuaikan dengan kebutuhan dari kinerja Dinas Perhubungan selaku lembaga yang melayani perhubungan di seluruh wilayah Kabupaten Pematang Jaya dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Review yang dilakukan yaitu dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Berikut adalah tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan :



**Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021  
Kabupaten Pemalang**

No	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp ribuan)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<i>tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan</i>	100%		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<i>tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan</i>	100%		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dishub	surat yang terkirim	3.500 surat	18,865	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dishub	surat yang terkirim	3.500 surat	20,751,5	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Dishub	sumber daya yang tercukupi	3 jenis, 12 bulan	181,200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Dishub	sumber daya yang tercukupi	3 jenis, 12 bulan	202.800	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dishub	kebutuhan peralatan dan perlengkapan	1 unit, 12 bulan	6,400	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dishub	kebutuhan peralatan dan perlengkapan	1 unit, 12 bulan	6.400	
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dishub	jumlah perizinan kendaraan dinas	38 kendaraan	36,900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dishub	jumlah perizinan kendaraan dinas	38 kendaraan	175.160	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dishub	jumlah petugas	26 orang, 12 bulan	237,000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dishub	jumlah petugas	26 orang, 12 bulan	260,700	
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dishub	perbaikan peralatan	1 jenis	6,000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dishub	perbaikan peralatan	1 jenis	6,600	
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dishub	kebutuhan atk	1 paket	15,514	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dishub	kebutuhan atk	1 paket	10,000	

8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dishub	kebutuhan Barang cetakan	3 paket	298,903	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dishub	kebutuhan Barang cetakan	3 paket	109.703	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dishub	keb. Komp. Listrik	2 jenis, 1 tahun (perawatan instalasi listrik dan pemasangan LPJU di terminal)	24,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dishub	keb. Komp. Listrik	2 jenis, 1 tahun (perawatan instalasi listrik dan pemasangan LPJU di terminal)	12.375	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dishub	jenis bahan bacaan	3 jenis, 12 bulan	5,340	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dishub	jenis bahan bacaan	3 jenis, 12 bulan	5.340	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dishub	jenis makanan	10 jenis, 12 bulan	69,110	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dishub	jenis makanan	10 jenis, 12 bulan	82.225	
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah	Dishub	pelaksanaan rapat	1 tahun	250,000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah	Dishub	pelaksanaan rapat	1 tahun	218.066	
13	Penyediaan Jasa Keamanan	Dishub	tenaga keamanan	31 orang, 12 bulan	385,400	Penyediaan Jasa Keamanan	Dishub	tenaga keamanan	31 orang, 12 bulan	423,940	
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Dishub	<i>meningkatkan sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan</i>	100%	487,795	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Dishub	<i>meningkatkan sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan</i>	100%	282,529,5	
14	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dishub	Pengadaan Kendaraan dinas	-	70,000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dishub	Pengadaan kendaraan dinas	5 kendaraan	93.385	
15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dishub	Perlengkapan gedung kantor	2 jenis	16,000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dishub	Perlengkapan gedung kantor	2 jenis	25,000	
16	Pengadaan Mebeleur	Dishub	Kebutuhan mebeleur	3 jenis	0	Pengadaan Mebeleur	Dishub	keb. mebeleur	3 jenis	26.060	

17	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Dishub	Pengadaan komputer	3 jenis	11,135	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Dishub	Pengadaan komputer	2 unit	25,000	
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dishub	pemeliharaan gedung kantor	1 unit	230,950	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dishub	pemeliharaan gedung kantor	1 unit	270,000	
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Dishub	kend. Dinas yang terpelihara	38 kend	93,920	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Dishub	kend. Dinas yang terpelihara	55 kend	93.385	
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dishub	pemeliharaan perlengkapan Gedung	3 jenis, 1 tahun	15,790	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dishub	pemeliharaan perlengkapan gedung	3 jenis, 1 tahun	51,510	
21	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dishub	Pemeliharaan mebeleur	1 tahun	15,000	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dishub	Pemeliharaan mebeleur	1 tahun	15,000	
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Perlengkapannya	Dishub	komputer yang terpelihara	47 unit	35,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Perlengkapannya	Dishub	komputer yang terpelihara	47 unit	35,000	
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<i>terwujudnya peningkatan disiplin aparatur</i>	100%		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<i>terwujudnya peningkatan disiplin aparatur</i>	100%		
23	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dishub	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai dishub	10 paket	0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dishub	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai dishub	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	30.345	
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<i>terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</i>	100%		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<i>terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</i>	100%		
24	Pelatihan Teknis Pelaksanaan Tupoksi SKPD	Dishub	Pegawai yang ikut pelatihan	91 orang	230,485	Pelatihan Teknis Pelaksanaan Tupoksi SKPD	Dishub	Pegawai yang ikut bintek	91 orang	0	

<b>E</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<i>tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan</i>	100%		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<i>tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan</i>	100%		
25	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dishub	tersusunnya laporan capaian kinerja	31 laporan	31,988	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dishub	tersusunnya laporan capaian kinerja	31 laporan	48.645	
26	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Dishub	tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 laporan	3,930	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Dishub	tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 laporan	2.663	
27	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dishub	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	4,860	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dishub	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	2,664	
28	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Dishub	pelaksanaan monev	7 laporan	24,870	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Dishub	pelaksanaan monev	7 laporan	54.535	
<b>F</b>	<b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>		<i>terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD</i>	100%		<b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>		<i>terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD</i>	100%		
29	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dishub	jenis dokumen	6 dokumen	52,950	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dishub	jenis dokumen	6 dokumen	126.376	
<b>G</b>	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>		<i>terwujudnya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan</i>	100%		<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>		<i>terwujudnya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan</i>	100%		
30	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	Dishub	Penyusunan kebijakan bidang perhubungan	2 perub	39,735	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	Dishub	Penyusunan kebijakan bidang perhubungan	2 perub	31.788	

31	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dishub	kegiatan koordinasi bid perhubungan	1 kegiatan	77,500	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dishub	kegiatan koordinasi bid perhubungan	1 kegiatan	53.417	
32	Sosialisasi Kebijakan di bidang Perhubungan	Dishub	Sosialisasi kebijakan	2 kegiatan	182,710	Sosialisasi Kebijakan di bidang Perhubungan	Dishub	Sosialisasi kebijakan	2 kegiatan	69.088	
33	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Dishub	kegiatan pembinaan petugas terminal	1 kegiatan	11,880	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Dishub	kegiatan pembinaan petugas terminal	1 kegiatan	13,068	
34	Peningkatan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dishub	Pembinaan dan koordinasi perparkiran	2 kegiatan	211,124	Peningkatan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dishub	Pembinaan dan koordinasi perparkiran	2 kegiatan	53.417	
35	Inventarisasi Data Sarana, Prasarana, dan Fasilitas Perhubungan	Dishub	Tersedianya data kinerja perhubungan	1 kegiatan	182,075	Inventarisasi Data Sarana, Prasarana, dan Fasilitas Perhubungan	Dishub	Tersedianya data kinerja perhubungan	1 kegiatan	535.715	
36	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dishub	Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan	1 kegiatan (sertifikasi tanah pelabuhan)	145,987,5	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dishub	Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan	1 kegiatan (sertifikasi tanah pelabuhan)	1.790.826	
<b>H</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>		<i>terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ</i>	100%	433,623	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>		<i>terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ</i>	100%	270,865,65	
37	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Dishub	kegiatan pemeliharaan alat uji	1 kegiatan	92,000	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Dishub	kegiatan pemeliharaan alat uji	1 kegiatan	156.354	
38	Rehabilitasi/Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Dishub	kegiatan pemeliharaan balai uji	1 gedung	45,000	Rehabilitasi/Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Dishub	kegiatan pemeliharaan balai uji	1 gedung	-	
39	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Dishub	terminal yang terpelihara	3 terminal	-	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Dishub	terminal yang terpelihara	3 terminal	-	

40	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	Dishub	pemeliharaan rambu lalu lintas	4 jenis	187,382	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	Dishub	pemeliharaan rambu lalu lintas	4 jenis	186.632	
41	Rehabilitasi/pemeliharaan Halte	Dishub	pemeliharaan Halte	1 paket	54,641	Rehabilitasi/pemeliharaan Halte	Dishub	pemeliharaan Halte	1 paket	94.758	
42	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlintasan KA	Dishub	Pemeliharaan perlintasan KA	2 jenis (pemeliharaan pos perlintasan KA dan pemeliharaan perlintasan KA)	54,600	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlintasan KA	Dishub	Pemeliharaan perlintasan KA	2 jenis (pemeliharaan pos perlintasan KA dan pemeliharaan perlintasan KA)	-	
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>		<i>meningkatnya pelayanan angkutan</i>	100%		<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>		<i>meningkatnya pelayanan angkutan</i>	100%		
43	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna Keselamatan penumpang	Dishub	terlaksananya pengujian kendaraan (update data KBWU)	550 orang	1,877,540	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna Keselamatan	Dishub	terlaksananya pengujian kendaraan (update data KBWU)	550 orang	146.680	
44	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum	Dishub	terlaksananya operasi laik jalan dan tertib administrasi	20 kali	62,480	Kegiatan Pengendalian Disiplin Angkutan Umum	Dishub	terlaksananya operasi laik jalan dan tertib administrasi	20 kali	-	
45	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	Pemalang, Comal, Moga Randudongkal	terlaksananya pam di terminal	408 orang	138,910	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	Pemalang, Comal, Moga Randudongkal	terlaksananya pam di terminal	408 orang	152,801	

46	Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal A	Pemalang, Petarukan, Angkot Pemalang, Comal	pemeliharaan kebersihan terminal	4 terminal (pemeliharaan drainase terminal angkutan kota)	1,622,430	Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal A	Pemalang, Petarukan, Angkot Pemalang, Comal	pemeliharaan kebersihan terminal	4 terminal (pemeliharaan drainase terminal angkutan kota)	866.410
47	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Dishub	Terlaksananya pengumpulan data	1 dokumen	122,160	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Dishub	Terlaksananya pengumpulan data	1 dokumen`	93.357
48	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Dishub	Terlaksananya sarana pelayanan angkutan	1 kegiatan, 12 bulan	73,482	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Dishub	Terlaksananya sarana pelayanan angkutan	1 kegiatan, 12 bulan	146.679
49	Fasilitasi Perizinan di bidang Perhubungan	Dishub	Terlaksananya pelayanan perizinan angkutan umum	1 kegiatan, 12 bulan	61,050	Fasilitasi Perizinan di bidang Perhubungan	Dishub	Terlaksananya pelayanan perizinan angkutan umum	1 kegiatan, 12 bulan	62.415
50	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan kepada para Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Dishub	terselenggaranya pemilihan dan pengiriman AKUT	40 orang	23,537	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan kepada para Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Dishub	terselenggaranya pemilihan dan pengiriman AKUT	40 orang	30.602
51	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Dishub	Koordinasi	12 laporan	58,620	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Dishub	koordinasi	12 laporan	64,482
52	Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal B	Randudongkal, Moga, Belik, Warungpring	pemeliharaan kebersihan terminal	4 terminal	2,120,695	Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal B	Randudongkal, Moga, Belik, Warungpring	pemeliharaan kebersihan terminal	4 terminal	-
<b>J</b>	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>		<i>terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</i>	100%		<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>		<i>terwujudnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas</i>	100%	

53	Pembangunan gedung terminal	Kabupaten Pemalang	<i>Terpenuhinya pembangunan terminal</i>	-	2,500,000	Pembangunan gedung terminal	Kabupaten Pemalang	<i>Terpenuhinya pembangunan terminal</i>	-	900.000	
<b>K</b>	<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>		<i>terwujudnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas</i>	100%		<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>		<i>terwujudnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas</i>	100%		
54	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Dishub	tersedianya rambu lalu lintas	1 paket	710,540	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Dishub	tersedianya rambu lalu lintas	1 paket	535.715	
55	Pengadaan marka jalan	Dishub	Tersedianya marka jalan	1 paket	474,100	Pengadaan marka jalan	Dishub	Tersedianya marka jalan	1 paket	-	
56	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	Dishub	tersedianya perlengkapan jalan	2 unit	1,238,820	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	Dishub	tersedianya perlengkapan jalan	2 unit	1.790.826	
57	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas di Jalan	Dishub	terlaksananya pam jalan, pengadaan HT	3 kegiatan	989,950	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas di Jalan	Dishub	terlaksananya pam jalan , pengadaan HT	3 kegiatan	936,763	
58	Koordinasi dalam Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas di Jalan	Dishub	terlaksananya koord trafficboard	1 kegiatan	49,990	Koordinasi dalam Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas di Jalan	Dishub	terlaksananya koord trafficboard	1 kegiatan	-	



Berdasarkan hasil review pada tabel 2.10 tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah kegiatan yang telah tercantum pada Simcan adalah sebanyak 53 kegiatan.
2. Dengan mulai diperlakukannya PERMENDAGRI No.90 Tahun 2019 Tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Program yang akan dilaksanakan oleh dinas perhubungan kabupaten pemalang ada 3 program dengan 50 sub kegiatan.
3. Dalam hal perencanaan anggaran, ada beberapa kegiatan yang harus di masukkan ke dalam perencanaan anggaran, hal tersebut lebih disebabkan karena adanya progres pekerjaan yang harus diselesaikan, yang disebabkan oleh refocusing anggaran di tahun sebelumnya.
4. Prioritas pendanaan lebih diberikan pada kegiatan-kegiatan rutin yang memang harus terpenuhi untuk berlangsungnya suatu organisasi, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target IKK dan SPM.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sesuai dengan program/kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang tidak melaksanakan program/kegiatan hasil Musrenbang yang telah diusulkan dari masyarakat.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah**

##### 1. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

###### a. Visi dan Misi Kementerian Perhubungan

Visi Kementerian Perhubungan adalah "Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong", dengan misi :

- 1) Meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
- 2) Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi bencana;
- 3) Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
- 4) Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
- 5) Mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Adapun tujuannya adalah :

- 1) Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
- 2) Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
- 3) Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;

- 4) Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
- 5) Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi

Sasaran strategis pembangunan transportasi nasional Tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Terwujudnya konektivitas nasional
- 2) Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan
- 3) Meningkatkan keselamatan transportasi
- 4) Meningkatkan kualitas SDM transportasi yang kompeten
- 5) Meningkatkan tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum
- 6) Meningkatnya pengawasan dan pengendalian;
- 7) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
- 8) Meningkatnya kualitas transportasi berkelanjutan

Beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari hasil telaah Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 yang berkaitan dengan kepentingan Kabupaten Pematang Jaya adalah:

- 1) Meningkatnya integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah; hal ini selaras misi pemerintah daerah yaitu Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya sebagaimana dimaksud untuk mendukung sasaran daerah Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dengan Meningkatkan kemudahan akses transportasi masyarakat serta Meningkatkan ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat
- 2) Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan; ini sejalan dengan rencana Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya antara lain :
  - a) Meningkatkan sarana prasarana terminal type C,
  - b) Peningkatan pemanfaatan teknologi pada pengujian kendaraan bermotor, pemantauan lalu lintas dan sarana prasarannya,

- c) Pemenuhan dan Peningkatan SDM yang professional pada Dinas Perhubungan yang bekerja sama dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD dalam bidang perhubungan darat.
- 3) Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif; ini sejalan dengan program Dinas Perhubungan dalam pemenuhan sarana prasarana jalan; peningkatan pengelolaan parkir tepi jalan umum, peningkatan kompetensi SDM pada pengujian kendaraan bermotor, pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum dalam bentuk pemilihan Abdi Yasa Teladan.

Adapun permasalahan pelayanan PD berdasarkan sasaran K/L beserta faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan sebagai berikut :

**Tabel Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan sasaran K/L**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan terminal masih rendah	Anggaran untuk peningkatan sarana prasana perhubungan terbatas	Adanya perhatian khusus dari pemerintah Daerah
2	Meningkatnya keselamatan transportasi Meningkatkan kualitas SDM transportasi yang kompeten	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana serta SDM perhubungan	Pengadaan sarana prasarana Lalu lintas kurang optimal, belum terpenuhinya SDM yang profesional	Adanya dukungan dari Pemerintah daerah, Provinsi dan pusat.
3	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum Meningkatkan pengawasan dan	Rencana Induk LLAJ yang ada saat ini tidak relevan dengan kondisi sekarang	Belum di lakukannya evaluasi Rencana Induk LLAJ	Adanya dukungan dari pemerintah Daerah untuk evaluasi Renacana Induk LLAJ

	pengendalian Meningkatnya pengawasan dan pengendalian Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik			
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

b. Kebijakan Nasional antara lain :

- 1) Pembangunan SDM Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama dengan tujuan membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama. Cara baru yang perlu dikembangkan salah satunya dengan endowment fund yang besar untuk manajemen SDM, pengoptimalan kerjasama dengan industri, serta penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.
- 2) Pembangunan Infrastruktur Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan membangun infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi dan mempermudah akses ke kawasan wisata sehingga dapat mendongkrak lapangan kerja baru dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
- 3) Penyederhanaan Regulasi Penyederhanaan, pernotongan, dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi. Langkah pertama adalah dengan cara menerbitkan 2 (dua) undang-undang besar yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Kedua Undang-Undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu Undang-Undang yang sekaligus merevisi beberapa Undang-Undang, bahkan puluhan Undang-Undang.
- 4) Penyederhanaan Birokrasi Penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, pemotongan prosedur yang panjang, dan pemangkasan birokrasi yang panjang. Penyederhanaan eselonisasi juga diperlukan sehingga menjadi 2 level saja yaitu diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan menghargai

kompetensi. Tujuan program pembangunan juga harus dilakukan secara serius oleh Menteri, Pejabat, dan Birokrat.

- 5) Transformasi Ekonomi Transformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- c. Arah kebijakan dan strategi dalam rangka meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi adalah :
- 1) Pendekatan sistem yang berkeselamatan (safe System approach) melalui koordinasi 5 pilar;
  - 2) Perencanaan berbasis data dan riset melalui pusat keselamatan jalan (road safety center);
  - 3) Penghapusan praktek muatan dan dimensi berlebih melalui penegakan hukum dan pengembangan jembatan timbang;
  - 4) Pengadaan sarana navigasi transportasi perairan (aids to navigation)
  - 5) Pengembangan SDM transportasi perairan melalui pusat pendidikan dan pelatihan (regional training center)

## 2. Telaah Renstra Provinsi Jawa Tengah

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Tengah. Misi kepala daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan Provinsi Jawa Tengah adalah pada misi ke tiga yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan gubernur No. 69 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terdapat program kerja Kepala Daerah yang difokuskan pada sektor transportasi yaitu pada program kerja Ke-7 "Pengembangan Transportasi Massal, Revitalisasi Jalur Kereta Dan Bandara Serta Pembangunan Embung/Irigasi".

Hal ini selaras dengan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang yaitu Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Permasalahan pelayanan PD berdasarkan sasaran Renstra Provinsi beserta faktor penghambat atau pendorong keberhasilan penanganannya sebagai berikut:

**Tabel Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Renstra Provinsi**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	Menurunnya minat masyarakat menggunakan layanan transportasi umum	Jumlah kendaraan pribadi meningkat	Dukungan dari pemerintah prov. untuk penyediaan angkutan umum masal dan peningkatan pelayanan
2	Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi	Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi	Terbatasnya anggaran untuk alokasi pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pusat

### 3. Pemerintah Kabupaten Pemalang

#### a. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pemalang dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah **"Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni"**.

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) Adil, (2) Makmur, (3) Agamis, (4) Ngangeni. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2021-2026.

Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1) Adil

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya

2) Makmur

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

3) Agamis

Agamis adalah kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

4) Ngangeni

Ngangeni adalah kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. "Pemalang itu ngangeni"

b. Misi

Pencapaian visi "**Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni**" ditempuh melalui 6 (enam) misi adalah :



1. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan

Dinas Perhubungan mendukung pencapaian misi yang ke 6 (Enam) yaitu **'Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan'** dengan Meningkatnya Konektivitas antar wilayah hal ini sangat terkait dengan fungsi Dinas Perhubungan yaitu Meningkatkan kemudahan akses transportasi masyarakat Dengan Meningkatkannya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat, maka program pembangunan yang mendukung misi keenam ini adalah:

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
  - a) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.
  - b) Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota.
  - c) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan
  - d) Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
  - e) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.
  - f) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
  - g) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dan
  - h) Pembangunan Fasilitas Parkir.
  - i) kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
  - j) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

## 2. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

### 4. Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang

#### a. Visi

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Tahapan sebagaimana tersebut di atas, dimulai dengan perumusan visi yang jelas. Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar Eksis, Antisipatif, dan Inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan instansi pemerintah. Visi tersebut harus mampu :

- Menarik, komitmen, dan menggerakkan orang;
- Menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi;
- Menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan (yang akan datang).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang mempunyai pernyataan visi sebagai berikut :

**“Terwujudnya Pelayanan Jasa Transportasi yang Aman, Nyaman, yang handal efektif dan efisien, yang berdaya saing”.**

#### Penjelasan Makna Visi

Dengan rumusan visi organisasi tersebut, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut :

Pelayanan Jasa transportasi yang dilaksanakan secara profesional dan mudah diharapkan dapat menciptakan rasa aman dan nyaman yang diperoleh masyarakat. Mampu meningkatkan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak, sehingga tercipta masyarakat yang cerdas dan sejahtera.

b. Misi

Untuk dapat meraih terwujudnya visi tersebut di atas, maka perlu ditetapkan suatu misi, yaitu sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang dipilih.

Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya adalah :

- 1) Mengembangkan manajemen transportasi darat yang memadai;
- 2) Meningkatkan jasa teknis pemeriksaan kendaraan bermotor;
- 3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan
- 4) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Perhubungan

Penjelasan Makna Misi

**Makna dari misi Pertama** adalah bahwa Pengembangan Manajemen Transportasi Darat dapat terciptanya peningkatan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, dan ketertiban berkendara merupakan wujud dari kedisiplinan para pengguna jalan.

**Makna dari misi Kedua** adalah bahwa Peningkatan Jasa Teknis Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan keselamatan berkendara di jalan pada umumnya, selain itu juga dapat meningkatkan SDM Penguji Kendaraan Bermotor yang profesional, dan juga dapat meningkatkan PAD.

**Makna dari Misi Ketiga**, Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan adalah meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan berupa terminal, halte, dan alat pengamanan perlintasan KA dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi dan meningkatkan keselamatan transportasi jalan.

**Makna dari Misi Keempat**, Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Perhubungan dalam rangka peningkatan daya saing dan profesionalisme adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

## 5. Permasalahan

Adapun permasalahan yang muncul dalam rangka penyelenggaraan urusan perhubungan tersebut adalah:

- a. Belum terpenuhinya fasilitas keselamatan jalan berpotensi menjadi daerah rawan kecelakaan lalu lintas
- b. Tingginya potensi kecelakaan yang disebabkan belum lengkapnya pemenuhan fasilitas keselamatan dan rendahnya kendaraan umum yang memenuhi aspek/ standar keselamatan
- c. Masih rendahnya tingkat konektivitas angkutan umum di Kabupaten Pematang Jaya
- d. Masih rendahnya tingkat konektivitas dan aksesibilitas transportasi yang disebabkan karena belum semua wilayah telah terlayani dengan angkutan umum dan rendahnya kinerja simpul transportasi di terminal
- e. Potensi kemacetan di perkotaan yang disebabkan potensi parkir yang belum dikelola dengan baik.
- f. Belum terpasangnya palang pintu di seluruh perlintasan sebidang.

Selain permasalahan tersebut di atas, masih banyak hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya, mengingat masih adanya kekurangan atau hal-hal yang harus dilakukan, antara lain :

- Sudah pudar/hilangnya marka jalan dan *zebracross*, terutama yang terdapat di jalan-jalan protokol ibukota kabupaten dan di depan sekolah-sekolah;
- Kurang tertibnya parkir yang ada di badan jalan, di jalan-jalan protokol yang melalui kawasan/pusat perdagangan di ibukota kabupaten;
- Masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas untuk jalan-jalan kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan di wilayah Kabupaten Pematang Jaya;
- Hilangnya beberapa rambu lalu lintas yang telah dipasang, karena kurangnya pengertian masyarakat akan arti pentingnya rambu lalu lintas bagi pengguna jalan.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban Dinas Perhubungan dengan segala isu-isu serta permasalahannya yang telah dipaparkan dalam BAB II, maka Rencana Dinas Perhubungan mempunyai tujuan dan sasaran agar visi dan misi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun dapat tercapai.

## 1. Tujuan dan Sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Pelayanan Angkutan dan indikator sasaran Prosentase pelayanan angkutan jalan di Kabupaten Pemalang, diharapkan pada akhir tahun 2026 mencapai 64,86% dengan sasaran :
  - 1) Meningkatnya Unit Terminal Penumpang dan Perparkian sesuai standar.
  - 2) Meningkatnya kendaraan yang lulus Uji KIR.
  - 3) Meningkatnya awak angkutan yang meningkat kompetensinya.
  - 4) Meningkatnya kendaraan angkutan umum yang laik jalan dan tertib administrasi.
- b. Meningkatnya Sarana prasarana perhubungan dan indikator sasaran *Level Of Service*, diharapkan pada akhir tahun 2026 mencapai 0,42%. Dengan sasaran :
  - 1) Meningkatnya sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik
  - 2) Meningkatnya persyaratan pembangunan pelabuhan yang terpenuhi
- c. Mewujudkan rencana serta potensi pengembangan wilayah dalam suatu kerangka sistem transportasi terpadu, dengan sasaran :
  - 1) Meningkatnya perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
  - 2) Meningkatnya ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas jalan.
  - 3) Meningkatnya pelayanan angkutan yang mendukung keselamatan transportasi jalan.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa teknis pemeriksaan kendaraan bermotor, dengan sasaran :
  - 1) Meningkatnya pelayanan teknis pemeriksaan kendaraan bermotor.
  - 2) Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor.
- e. Meningkatkan infrastruktur prasarana dan fasilitas perhubungan, dengan sasaran :
  - 1) Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan.

- f. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sasaran :
- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi.
  - 2) Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran.
  - 3) Meningkatnya kualitas SDM.
  - 4) Meningkatnya kualitas perencanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan daerah.
  - 5) Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

## 2. Strategi dan Arah Kebijakan

### a. Strategi

Strategi untuk mencapai Tujuan 1 (Meningkatnya Pelayanan Angkutan ), yaitu : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Angkutan Jalan serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien

- a) Meningkatkan pengelolaan perparkiran.
- b) Meningkatkan pengadaan rambu lalu lintas, marka jalan, dan sarana dan prasarana perlengkapan jalan.
- c) Meningkatkan pemeliharaan prasarana dan perlengkapan jalan.
- d) Meningkatkan pelayanan perizinan angkutan umum.
- e) Meningkatkan ketertiban lalu lintas dan keselamatan transportasi.

Strategi untuk mencapai Tujuan 2 (Meningkatkan kualitas pelayanan jasa teknis pemeriksaan kendaraan bermotor), yaitu :

- 1) Meningkatkan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- 2) Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor.

Strategi untuk mencapai Tujuan 3 (Meningkatkan infrastruktur prasarana dan fasilitas perhubungan), yaitu :

- 1) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan terminal.
- 2) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan shelter dan halte.
- 3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan alat pengamanan perlintasan sebidang.

Strategi untuk mencapai Tujuan 4 (Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah), yaitu :

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana publik.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah melalui pelatihan dan bintek bagi aparatur perhubungan.
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan dan pembangunan.
- 4) Meningkatkan pelayanan angkutan dan terminal.

b. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan untuk mencapai Tujuan 1 (Mewujudkan rencana serta potensi pengembangan wilayah dalam suatu kerangka sistem transportasi terpadu), yaitu :

- 1) Peningkatan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
- 2) Peningkatan pengelolaan perparkiran.
- 3) Peningkatan pengadaan rambu lalu lintas, marka jalan, dan sarana dan prasarana perlengkapan jalan.
- 4) Peningkatan pemeliharaan prasarana dan perlengkapan jalan.
- 5) Peningkatan pelayanan perizinan angkutan umum.
- 6) Peningkatan ketertiban lalu lintas dan keselamatan transportasi.

Arah Kebijakan untuk mencapai Tujuan 2 (*Meningkatkan kualitas pelayanan jasa teknis pemeriksaan kendaraan bermotor*), yaitu :

- 1) Peningkatan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- 2) Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor.

Arah Kebijakan untuk mencapai Tujuan 3 (*Meningkatkan infrastruktur prasarana dan fasilitas perhubungan*), yaitu :

- 1) Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan terminal.
- 2) Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan shelter dan halte.
- 3) Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan alat pengamanan perlintasan sebidang.

Arah Kebijakan untuk mencapai Tujuan 4 (*Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah*), yaitu :

- 1) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik.
  - 2) Peningkatan pelatihan dan bintek bagi aparat perhubungan.
  - 3) Peningkatan pengawasan pelaksanaan program pembangunan daerah.
  - 4) Peningkatan pelayanan angkutan dan terminal.
1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan :
    - a. Pembangunan Gedung Terminal;
    - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian.
  2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, yaitu dengan melaksanakan kegiatan :
    - a. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas;
    - b. Pengadaan Marka Jalan;
    - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan;
    - d. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas di Jalan;
    - e. Koordinasi dalam Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

Sedangkan Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pemalang maka strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**1. Meningkatkan Sarana Prasarana Dasar Serta Memperkuat Sentra-Sentra Produksi Berbasis Kewilayahan Seseuai Dengan Karakteristik Dan Potensi Wilayah.**

**Strategi:**

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan, dan perbaikan sistem manajemen transportasi.

**Kebijakan:**

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang keselamatan dalam berlalu lintas.



**Tabel 3.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

No	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan, dan perbaikan sistem manajemen transportasi	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang keselamatan dalam berlalu lintas
2	Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan angkutan jalan serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien
3	Mengembangkan jaringan layanan lalu lintas	penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten

### **3.3 Program dan Kegiatan PD**

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Tahun 2021-2026 yang bereferensi pada RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai arah kinerja SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas serta terjaminnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dan PD yang menjadi bidang tugas.

Disamping kedudukan yang demikian, program dan kegiatan Dinas Tahun 2022 diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat serta tolak ukur pencapaian arah kebijakan, visi dan misi Bupati Pemalang yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021– 2026.

Dari prioritas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang menetapkan beberapa sasaran seperti tersebut di atas. Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut, diperlukan dukungan oleh segenap komponen organisasi yang terintegrasi dalam rencana program dan kegiatan terpadu.

Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang pada Tahun 2022 terdiri dari 10 Program dan 57 Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat

- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
  - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
  - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
  - g. Penyediaan alat tulis kantor
  - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
  - j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - k. Penyediaan makanan dan minuman
  - l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah
  - m. Penyediaan jasa keamanan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
    - a. Pengadaan kendaraan dinas operasional
    - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
    - c. Pengadaan Mebeleur
    - d. Pengadaan komputer dan perlengkapannya
    - e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
    - f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
    - g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
    - h. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
    - i. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya
  3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
    - a. Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD
  4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
    - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
    - b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
    - c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
    - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  5. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
    - a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
  6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
    - a. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan

- b. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
  - c. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
  - d. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
  - e. Peningkatan pengelolaan parkir di tepi jalan umum
  - f. Inventarisasi data sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan
  - g. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- a. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
  - b. Rehabilitasi/pemeliharaan balai pengujian kendaraan bermotor
  - c. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
  - d. Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas
  - e. Rehabilitasi/pemeliharaan halte
  - f. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana perlintasan KA
- 8 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- a. Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
  - b. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan
  - c. Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal
  - d. Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal A
  - e. Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan
  - f. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
  - g. Fasilitasi Perizinan di bidang Perhubungan
  - h. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum teladan
  - i. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
  - j. Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal B
9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- a. Pembangunan gedung terminal
10. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- a. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
  - b. Pengadaan Marka Jalan

- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan
- d. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas di Jalan
- e. Koordinasi dalam Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

**Tabel 3.2.** Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dan Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2022

Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya

SKPD : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2021 (dalam ribuan Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2022 (Dalam ribuan Rp)	Jenis Kegiatan (1/2/3)	SKPD
					Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target (%)	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Prosentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100 %					175.021	150.074		





				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Jumlah gaji dan tunjangan untuk ASN (orang)	81		8.667.876	8.141.078			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk	Pemalang			Jumlah laporan keuangan akhir tahun (Dokumen)	1	Terpenuhinya tanggung jawab SKPD melalui laporan keuangan dan kinerja SKPD selama satu tahun	100	2.016	684		



				pemerataan nya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataan nya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa											
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataan nya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan	Pemalang		Jumlah laporan keuangan bulanan, triwulan/se mesteran SKPD (Dukomen)	12	Terpenuhinya tanggung jawab SKPD melalui laporan keuangan dan kinerja dalam satu semester	100	2.664	1.272		



					wilayah guna penguatan arus barang dan jasa												
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang		Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dalam satu tahun (jenis)	4			54.535	38.771			

						Prosentase administrasi umum perangkat daerah tercukupi dalam satu tahun	100								
			Administrasi Umum Perangkat Daerah												
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang		Jumlah komponen instalasi listrik terpenuhi (bulan)	12	Terpenuhinya dukungansumber daya energi untuk pelayanan administrasi perkantoran	100	12.375	6.550		















					pemerataan nya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa												
					Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataan nya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataan nya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang		Jumlah aset tetap tersedia (unit)	8	Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor untuk menunjang peningkatan kinerja aparatur	100	25.000	35.000			

						Prosentase terwujudnya program penunjang urusan pemerintahan daerah	100							248.472		
						Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataan antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa										
						Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataan antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang									
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah surat terkirim (Surat)	1000	Tersampainya surat dengan baik	100	24.900	31.500		





					arus barang dan jasa												
					Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa				Jumlah mebel tersedia (jenis)	6	Mebeleur kantor dalam kondisi baik untuk menunjang peningkatan kinerja aparatur	100	15.000	12.500		
					Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan				Jumlah peralatan dan mesin tersedia (buah)	5	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja dalam kondisi baik	100	6.000	-		
					Pemeliharaan Mebel	Pemalang											
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemalang											

				pemerataan nya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	n kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur r dan pemerataan nya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa											
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur r dan pemerataan nya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur r dan pemerataan nya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang		Jumlah aset tetap tersedia (jenis)	30			35.000	28.900		





					nya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa										
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataan nya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataan nya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang		Jumlah sarana dan prasarana pendukung terpelihara dalam satu tahun (unit)	17		51.510	19.200		
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>									3.864.023		
				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			Prosentase Rencana Induk yang ditetapkan	20				<b>230.954</b>	233.874		



				guna penguatan arus barang dan jasa	pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa											
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			Prosentase penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota (%)	60					2.607.930	785.074		
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan	Pemalang		Jumlah prasarana Jalan terbangun (unit)	65	Meningkatnya keselamatan lalu lintas jalan	100	1.790.826	447.974		

					arus barang dan jasa											
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang		Jumlah perlengkapan Jalan tersedia (jenis)	3	Meningkatnya keselamatan lalu lintas jalan	100	535.715	78.250		
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan	Pemalang		Jumlah prasarana jalan terpelihara (jenis)	2	Terpelihara dan berfungsinya APILL dan rambu dengan baik	100	94.758	79.250		

				wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa											
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang		Jumlah perlengkapan jalan terpelihara (jenis)	4	Terpelihara fasilitas perlengkapan jalan dengan baik	100	186.632	179.600		
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				Prosentase pengelolaan terminal penumpang tipe C		100			1.766.410	489.274		









				nya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa					KBWU)					
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang			Jumlah sarana dan prasarana pengujian terpelihara (jenis)	11		156.354	360.000	





					nya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa										
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataan nya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataan nya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Pemalang		Jumlah pengawasan dan pengendalian efektifias pelaksanaan kbijakan untuk jalan kabupaten/kota (jenis)	8		936.763	1.122.908		
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				Prosentase pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ (%)		100		177.282	100.323		











				Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Keberlanjutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa	Terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur dan pemerataannya antar wilayah guna penguatan arus barang dan jasa															
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				Prosentase persyaratan pembangunan pelabuhan	80										240.000	334.580	
				Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau															80	240.000	334.580



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2022 mengacu pada Rancangan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2022. Renja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dengan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pemalang, sehingga target kinerja pada akhir tahun periode Renstra dapat tercapai.

Dinas Perhubungan melaksanakan satu urusan yaitu urusan perhubungan. Urusan perhubungan diprioritaskan pada peningkatan manajemen transportasi darat, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perhubungan, dan peningkatan pelayanan angkutan.

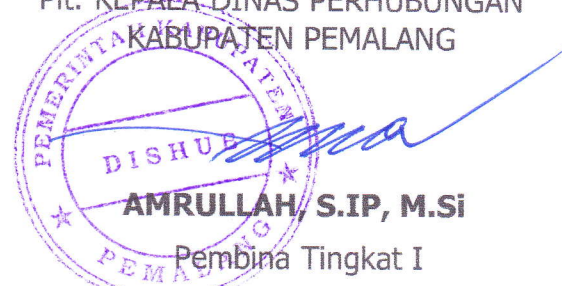
Program dan kegiatan yang disusun dalam Renja ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi, prioritas, dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah pada tahun anggaran bersangkutan.

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2022, dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir.

Sebagai konsekuensinya diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2022, yang akan terwujud dalam perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2022.

Pemalang, 18 Oktober 2021

Pit. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PEMALANG



**AMRULLAH, S.IP, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19650215 198603 1 013